



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO:468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO.4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PKL DI KOTA BANDUNG
(Studi Kasus di Kecamatan Regol)

Skripsi

Diajukan untuk Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Karine Alexandra Yufian

2016310017

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO:468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO.4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PKL DI KOTA BANDUNG
(Studi Kasus di Kecamatan Regol)

Skripsi

Oleh :

Karine Alexandra Yufian

2016310017

Pembimbing :

Dr. Indraswari

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Karine Alexandra Yufian
Nomor Pokok : 2016310017
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Regol)

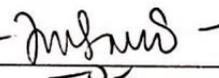
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 6 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris
Indraswari, M.A., Ph.D.

: 

Anggota
Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Karine Alexandra Yufian

NPM : 2016310017

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung (Studi
Kasus di Kecamatan Regol)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian akademik yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 November 2019



Karine Alexandra Yufian

ABSTRAK

Nama : Karine Alexandra Yufian

NPM : 2016310017

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Di Kota Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Regol)

Penelitian ini membahas evaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yaitu kebijakan zonasi, kebijakan relokasi, dan kegiatan bimbingan teknis khususnya di Kecamatan Regol. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori evaluasi oleh William Dunn, yang terdiri dari 6 kriteria evaluasi yaitu [1] *effectiveness*, [2] *adequacy*, [3] *equity*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, diambil sebanyak 20 informan yang terdiri dari pedagang kaki lima dan masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Regol, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dan pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 3 kegiatan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 khususnya di Kecamatan Regol masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Bandung selaku pembuat kebijakan perlu memberikan fasilitas kepada pkl dan membuat alternative kebijakan lainnya. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan rekrutmen. Evaluasi yang dilaksanakan sekiranya tidak hanya menjadi sebuah formalitas saja, tetapi betul-betul menjadi sebuah rekomendasi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

Kata Kunci : penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, Evaluasi kinerja kebijakan

ABSTRACT

Name : Karine Alexandra Yufian

NPM : 2016310017

Title : Evaluation of Bandung City Regional Regulation Number 4 Year 2011 About Arrangement and Development of Street Vendors (Case Study in Regol District).

The purpose of this research is to evaluate the performance of policy of Bandung City Regional Regulation Number 4 Year 2011 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors. The purpose of this research will asses the performance of Bandung City Regional Regulation Number 4 Year 2011 about Arrangement and Development of Street Vendors especially in Regol District, researcher using Evaluation criterion from William Dunn. To achieve the objectives of this research uses the theory of evaluation by William Dunn, consist of 6 criterian evaluation

The research method used is qualitative and data collection technique through in-depth interviews, observations, participatory observations, and documents. In this research, take 20 informants consisting of street vendors and the community around Regol District, police officer of the civil service of Bandung City, and Bandung City Cooperative Service employees.

The result shows that Compliance Street Vendors Against Regional Regulation of Bandung City Number 04 of 2011 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors in Regol District doesn't work well. The government as a policy maker needs to revise the policies and make other policy alternatives. The advice given by researchers is that the police officer of the civil service of Bandung City, and Bandung City Cooperative Service employees can be more optimal in carrying out their duties by recruiting. The evaluation carried out will not only be a formality, but actually become a recommendation in the next policy making.

Keywords: Arrangement and Development of Street Vendors, Evaluation of policy performance

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, serta anugerahNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Regol)”.

Keterbatasan dan masih kurangnya kemampuan yang dimiliki penulis, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna membuat skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menjadi lebih baik.

Ucapan rasa syukur dan terima kasih dengan tulus penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan kepada penulis. Untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Yufian Fredy Boenjamin dan Ibu Lina Herlina, serta adik penulis, Kresna Wijaya Kusumah, tak henti saya ucapkan terima kasih untuk setiap doa, dorongan, kasih sayang dan semua yang telah diberikan kepada saya.

Penulis mengucapkan terima kasih dari hati terdalam untuk Ibu Dr. Indraswari selaku Pembimbing yang telah membantu, membimbing, memberikan wejangan, masukan, dan juga waktu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Pius Suratman Kartasasmita selaku dosen wali penulis.
4. Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Mendy Mursal, Bapak Trisno Sakti Herwanto, terima kasih atas semua ilmu, didikan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjalani proses perkuliahan.
5. Sahabat-sahabat SMA tercinta, Elvira Angelica, Cindy C.C , Christine Fitria, Jessica T , dan Sandra Wijaya
6. Sahabat-sahabat tercinta, Revika Ploriska, Dayva Constantia Viola, Danella Dhiastari, Nabila Yulia, dan Agnes Nathania Candra.
7. Keluarga Besar Bapak Dedi Djuhendi.
8. Keluarga Besar Bapak Fredy Bunyamin.
9. Keluarga Besar Abah Nanang dan Kumpulan PNK.
10. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016.
11. Teman-teman FISIP angkatan 2016
12. Sahabat – sahabat Kuro Koffee, Ko Handaya Boday, Ci Jessica Olivia Tedja, Ci Ruthania Imanuel, Ci Marsella Giovanni.

13. Serta semua kerabat yang penulis kenal yang sudah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan menempuh pendidikan atau untuk kerabat diluar perkuliahan dimana pun kalian berada penulis ucapkan terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan dan semua dukungan yang sangat berarti untuk penulis pada proses penulisan skripsi ini

Akhir kata, penulis mengharapkan bahwa skripsi yang telah penulis buat ini tidak hanya sekedar formalitas saja tetapi juga nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 26 November 2019

Karine Alexandra Yufian

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 21 |
| 1.3 Identifikasi Masalah | 21 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 22 |
| 1.5 Kegunaan Penelitian | 23 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 25 |
| 2.1 Pengertian Administrasi Publik | 25 |
| 2.2 Definisi Kebijakan Publik | 27 |
| 2.3 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik..... | 28 |
| 2.3.1 Jenis Evaluasi | 30 |
| 2.4 Definisi Studi Kasus | 31 |
| 2.5 Teori evaluasi William Dunn | 32 |
| 2.6 Model Penelitian | 35 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7 Operasional Variabel | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 39 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 39 |
| 3.2 Peran Peneliti | 40 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 40 |
| 3.4 Variabel Penelitian | 43 |
| 3.5 Sumber Data | 44 |
| 3.5.1 Sumber primer..... | 44 |
| 3.5.2 Sumber sekunder | 44 |
| 3.6 Prosedur Pengumpulan Data | 43 |
| 3.7 Analisis Data | 46 |
| 3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan | 47 |
| BAB IV PROFIL PENELITIAN | 49 |
| 4.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja | 49 |
| 4.1.1 Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ... | 50 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung | 51 |
| 4.1.3 Tugas pokok, fungsi, dan Kewenangan SATPOL PP Kota Bandung .. | 52 |
| 4.1.4 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung .. | 54 |
| 4.2 Profil Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung | 57 |
| 4.2.1 Gambaran umum Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung | 57 |
| 4.2.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung..... | 58 |
| 4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung | 59 |
| 4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung..... | 61 |
| 4.3 Gambaran Umum Kecamatan Regol | 64 |
| 4.3.1 Kondisi umum Kecamatan Regol..... | 64 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 71 |
| 5.1 Gambaran umum Perda Nomor 4 tahun 2011 | 71 |
| 5.2 Evaluasi Perda Nomor 4 tahun 2011 | 80 |
| 5.2.1 Efektivitas Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 | 86 |
| 5.2.2 Kecukupan Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 | 94 |
| 5.2.3 Ketenggapan Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 | 96 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 97 |
| 6.1 Kesimpulan | 101 |
| 6.2 Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Model Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn | 30 |
| Gambar 2.2 Model Penelitian | 31 |
| Gambar 3.1 Peta Kota Bandung | 41 |
| Gambar 3.2 Peta Kecamatan Regol..... | 42 |
| Gambar 3.3 Peta Persebaran PKL Kecamatan Regol..... | 43 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi SATPOL PP | 56 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung | 63 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL Murni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018.....8

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Pengamatan Partisipasi Peneliti di Kecamatan Regol | 101 |
| Lampiran 2 Pedoman Wawancara | 104 |
| Lampiran 3 Kartu Bimbingan..... | 115 |
| Lampiran 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya berkontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat¹. Permasalahan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi setiap tahunnya. Setiap tahunnya, pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung kian menjamur dan meluas, hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang di dalamnya terdapat permasalahan tidak meratanya pemerataan pembangunan nasional dan kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi agenda dunia, agenda prioritas pembangunan yang mana termuat dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan 17 tujuan. Permasalahan mengenai pedagang kaki lima (PKL) ini termasuk ke dalam tujuan SDGs nomor 8 yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ke 8 bertujuan untuk mendukung

¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011. Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_4_2011.pdf. Diakses pada tanggal 2 September 2019. Pukul 15.56 WIB

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Adapun target dari SDGs nomor 8 ini diantaranya adalah

1. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita.
2. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya.
3. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan²

Bertambahnya ruang publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung pada awalnya bertujuan untuk menyenangkan masyarakatnya, namun justru terdapat dampak negatif dibalik tujuan tersebut. Kemajuan tersebut justru mengundang para pedagang yang berasal dari dalam maupun dari luar (pendatang) Kota Bandung untuk berjualan memakai roda kaki lima di sekitaran jalan atau pinggir jalan. Salah satunya adalah di Kecamatan Regol yang memiliki luas wilayah sebesar 430Km² dengan banyaknya

² Sustainable Development Goals. 2014. Tujuan 08. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/16-tujuan-delapan.Diakses> pada tanggal 3 September 2019. Pukul 11.38 WIB

penduduk sebesar 84.039 jiwa. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang jumlahnya sekitar 11.907 orang, yang di dalamnya terdiri dari 2.502 kios/warung kelontong, 25 restoran, 185 warung makan, 20 swalayan, 528 toko, 3 pasar umum, 141 UKM, 24 Koperasi, dan 187 usaha perdagangan lainnya. Tentunya jumlah tersebut lebih tinggi daripada dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian lain seperti PNS yang berjumlah 7.329, ABRI/POLRI yang berjumlah 635, Pegawai swasta 11.577, dan petani sejumlah 536³.

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL Murni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018⁴

| Nama Kecamatan | Jumlah Pedagang | Nama Kecamatan | Jumlah Pedagang |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Andir | 1457 | Cicendo | 740 |
| Antapani | 885 | Cidadap | 88 |
| Arcamanik | 428 | Cinambo | 71 |
| Astanaanyar | 1800 | Coblong | 2744 |
| Babakan Ciparay | 464 | Gedebage | 12 |
| Bandung Kidul | 122 | Kiaracondong | 1119 |
| Bandung Kulon | 230 | Lengkong | 1113 |
| Bandung Wetan | 991 | Mandalajati | 62 |
| Batununggal | 576 | Panyileukan | 76 |
| Bojongloa Kaler | 290 | Rancasari | 167 |
| Bojongloa Kidul | 237 | Regol | 3263 |
| Buahbatu | 720 | Sukajadi | 1966 |
| Cibeunying Kaler | 159 | Sukasari | 354 |
| Cibeunying Kidul | 1105 | Sumur Bandung | 639 |
| Cibiru | 78 | Ujungberung | 403 |

³ Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2018. Kecamatan Regol Dalam Angka.

<https://bandungkota.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 September 2019. Pukul 08.34 WIB

⁴ Open Data Kota Bandung. 2018. Data Jumlah PKL Murni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018.

<http://data.bandung.go.id>. Diakses pada tanggal 3 September 2019. Pukul 19.36 WIB

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Regol menduduki peringkat pertama jumlah pedagang kaki lima (PKL) terbanyak se Kota Bandung. Tidak diragukan lagi, faktanya dapat terlihat dari kasat mata besarnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar kawasan Kecamatan Regol, khususnya di Jalan Kepatihan, Dewi Sartika, Ottista, Muhammad Toha, Alun-alun dan sekitaran mall ITC Kebon Kelapa.

Pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Regol, sebagian merupakan pedagang kaki lima yang memang berasal dari Kecamatan Regol, tetapi sebagian besar merupakan pedagang kaki lima yang berasal dari luar Kecamatan Regol, hal ini dikarenakan pedagang kaki lima tersebut berjualan secara mobile atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih ramai pengunjung, seperti halnya Alun-alun Kota Bandung yang berada di Kecamatan Regol. Bahkan banyak juga pedagang kaki lima yang berasal dari luar Kota Bandung, seperti misalnya berasal dari kota Cianjur, Solo, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka. Pedagang kaki lima tersebut merantau dari daerah tinggal asalnya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Sedangkan yang disebut sebagai pembinaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah usaha, tindakan, dan kegiatan dan

dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Adapun tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diantaranya adalah :

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib.
- b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata .⁵

Aktivitas pedagang kaki lima pada umumnya mereka menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Keamanan ini menyangkut pada terciptanya kondisi lingkungan yang aman, karena kondisi dari masih banyaknya PKL yang ada akan menciptakan permasalahan lainnya seperti kemacetan dan sulitnya pergerakan orang di pedestrian. PKL yang menempati ruang dan jalan publik dapat menciptakan masalah sosial lainnya seperti pencopet, pencuri, dan kecelakaan lalu lintas.

Kebersihan menyangkut pada terciptanya lingkungan yang terbebas dari sampah. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang menempati trotoar maupun pinggir jalan menciptakan masalah pada banyaknya limbah / sampah yang dibuang sembarangan. Hal ini disebabkan karena para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit untuk diwujudkan. Ketertiban menyangkut pada terciptanya lingkungan yang tertata dan teratur. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar maupun pinggir

⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

jalan mengartikan bahwa masih banyak PKL yang tidak tertib. Lingkungan tersebut dikatakan tertib jika PKL yang ada tidak melanggar dan tertib berjualan di tempat yang semestinya atau yang sudah disediakan.

Kebijakan dari pemerintah daerah Kota Bandung menetapkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini terdapat kesenjangan di dalamnya. Dimana seharusnya kebijakan ini sudah dapat menjadikan lingkungan lebih tertib dari berkurangnya pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya tidak, justru jumlah pedagang kaki lima setiap tahunnya meningkat. Kecamatan Regol sendiri mempunyai 48 ruas jalan, pedagang kaki lima yang sangat banyak jumlahnya menumpuk di beberapa titik yaitu di jalan kepatihan, dewi sartika, otista, balong gede, alun-alun bandung, dan kawasan di depan perbelanjaan ITC Kebon Kelapa.

Beberapa jalan diatas merupakan kawasan yang padat akan pedagang kaki lima, dari jalan satu ke jalan yang lainnya saling berhubungan dan saling berdekatan. Keberadaan beberapa jalan diatas sangat strategis yaitu berada di pusat kota. Dari 48 jumlah jalan yang ada hanya kawasan tersebut yang sangat dominan dan paling banyak terdapat pedagang kaki lima di ruas jalan maupun di atas trotoar. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan tujuan wisata yang mengundang banyak wisatawan. Terdapat kurang lebih sekitar 700 pedagang kaki lima, jumlah ini tentunya meningkat dua hingga tiga kali lipat jika akhir pekan atau musim liburan tiba. Terlebih jika bulan puasa, menjelang waktu berbuka pedagang kaki lima ada di setiap ruas

jalan. Jarak dari pedagang kaki lima satu dengan yang lainnya hanya berjarak beberapa meter saja.

Pedagang kaki lima (PKL) pada dasarnya sangat merugikan. Dampak maupun kerugian yang dapat dilihat berupa semakin tidak terkendalinya pedagang kaki lima (PKL) yang menyebabkan pada dampak penurunan kualitas ruang kota. Sehingga mereka berpikir bahwa semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) mengambil ruang dimana saja seperti jalur pejalan kaki, ruang atau lapangan terbuka, lapangan hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena mobilitas pedagang kaki lima yang bisa berjualan dimana dan kemana saja, sehingga ruang publik yang ada menjadi tidak tertata. Akibatnya adalah banyak permasalahan lain yang bermunculan yang dikarenakan oleh pedagang kaki lima (PKL) tersebut, seperti halnya kemacetan karena mengganggu jalur lalu lintas yang juga dapat mengganggu pengemudi kendaraan menjadi tidak nyaman dalam berkendara.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, agar setiap pedagang yang akan berjualan ditrotoar atau lokasi yang dilarang dilakukan penataan, disamping itu pemerintah juga sebagai timbal baliknya menyediakan tempat yang layak ditempati oleh para pedagang tersebut agar tidak kehilangan pekerjaannya. Maka pedagang tersebut tidak akan merasa dirugikan oleh adanya pembersihan pada lapak yang dilarang.

Tidak hanya itu, pembinaan juga dilakukan untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima.

Pemerintah sudah banyak melakukan upaya dalam menertibkan dan menurunkan jumlah pedagang kaki lima (PKL), hal tersebut dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini lahir karena semakin meningkat dan meluasnya jumlah pedagang kaki lima (PKL). Peraturan tersebut melahirkan sebuah kebijakan Zonasi. Zona merah merupakan wilayah dilarang berdagang. Zona kuning, merupakan wilayah yang diperbolehkan, tapi hanya waktu tertentu dan sifatnya sementara, dan zona hijau yang merupakan wilayah diperbolehkan berdagang.

Selain kebijakan Zonasi, pemerintah Kota Bandung juga merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan yang berasaskan pada Perda tersebut, namun hal tersebut justru membuat lapak jualan para pedagang kaki lima (PKL) tidak laku. Keadaan ini disebabkan, jauhnya lokasi yang diberikan seperti relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Gede bage. Hal ini kurang strategis, dan justru membuat para pedagang kaki lima (PKL) untuk lagi berjualan kembali di lokasi yang tidak boleh digunakan untuk berjualan.

Pembinaan yang dilakukan disebut dengan BIMTEK atau Bimbingan Teknis. Kegiatan bimbingan teknis ini sangat penting dilakukan dalam upaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pedagang. Sehingga,

dengan mendapatkan materi pelatihan diharapkan para pedagang kaki lima bisa meningkatkan taraf kerja dan taraf kehidupan yang lebih baik.

Dalam penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Regol, penulis menggunakan model teori Evaluasi dari William Dunn, karena sangat cocok untuk penelitian ini. Teori ini berbicara mengenai enam kriteria evaluasi dalam melakukan evaluasi dari sebuah kebijakan yang ada. Dimana, pada akhirnya dapat dilihat apakah suatu kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak. Terdapat unsur penting yang menurut William Dunn dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, diantaranya adalah :

1. Keefektifan atau *Effectiveness*

Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Kecukupan atau *Adequacy*

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

3. Perataan atau *Equity*

Berkenaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunju pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.⁶

Berlandaskan dari uraian latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus di Kecamatan Regol)”.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keberhasilan dari kebijakan relokasi, zonasi, serta bimbingan teknis dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kecamatan Regol Kota Bandung)”

1. 3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis akan mengevaluasi keberhasilan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4

⁶ Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.Hal 429-438

tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung yang secara rinci akan dimunculkan 3 pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana keberhasilan dari kebijakan relokasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ?
2. Bagaimana keberhasilan dari kebijakan zonasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ?
3. Bagaimana keberhasilan dari kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ?

1. 4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mendeskripsikan keberhasilan dari kebijakan relokasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk mendeskripsikan keberhasilan dari kebijakan zonasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

3. Untuk mendeskripsikan keberhasilan dari kegiatan bimbingan teknis dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1. 5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1.5.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam kajian-kajian tentang kebijakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.5.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi pemerintah Kota Bandung dan para implementor kebijakan dalam menentukan dan menjalankan program untuk meningkatkan kinerja dan partisipasi masyarakat.

1. 6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

BAB I PENDAHULUAN

bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

bagian ini menjelaskan mengenai pengertian administrasi publik, kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, jenis evaluasi, studi kasus, teori evaluasi William Dunn, model penelitian dan operasional variabel .

BAB III METODE PENELITIAN

bagian ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, variable penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

bagian ini menjelaskan mengenai Profil Dinas terkait.

BAB V ANALISIS DATA

bagian ini menjelaskan mengenai analisis berdasarkan 6 aspek teori evaluasi yaitu: efektivitas, efisiensi, kepuasan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.